

**PENGAMANAN HAK KEUANGAN NEGARA
BERUPA BEA MASUK PADA PERUSAHAAN
PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
YANG DINYATAKAN PAILIT**

KARYA TULIS AKHIR TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum Pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

TUMBUR ABARHAM JONATHAN HUTABARAT

NIM 2002190026



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERNYATAAN KEASILAN KARYA TUGAS AKHIR


Nama : Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat
Nim : 2002190026
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis
Judul : Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk
Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan
Berikat Yang Dinyatakan Pailit.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL: Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Yang Dinyatakan Pailit.

Nama : Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat
Nim : 2002190026
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 28 Juli 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MBA Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.

Program Studi Magister Hukum

Ketua



Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Program Pascasarjana

Direktur



Dr. Butang R. Simbolon, M. Si.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 28 Juli 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat
Nim : 2002190026
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul:

Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Yang Dinyatakan Pailit oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda Tangan
1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MBA	Ketua	
2. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.	Penguji	
3. Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si.	Penguji	

Jakarta, 1 Agustus 2022



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat
Nim : 2002190026
Program Studi : Hukum Program Magister Pasca Sarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Yang Dinyatakan Pailit.

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas Akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku,

Jakarta, 1 Agustus 2022



Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Yang Dinyatakan Pailit”**.

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia (UKI). Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan bahkan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kasih dan sayang-Nya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan tesis ini;
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Ibu Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, SH, MH, selaku Ketua Program Studi MIH Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus ketua siding penguji yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH., M.H Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus penguji yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. MS. Tumanggong, S.H., M.Si. selaku penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan guna penyempurnaan tesis ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).
10. Istri Penulis, Vera Apri Linda Silalahi yang senantiasa sabar, memberi semangat, dan senantiasa berdoa, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Anak – anak Penulis; Juan Mora Yehezkiel Hutabarat, Nada Uli Evangelina Hutabarat dan Nicholas Matthew Hasian Hutabarat yang telah bersabar dan senantiasa berdoa, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
12. Rekan-rekan Pascasarjana Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan, semangat kebersamaan dan dorongannya kepada penulis.
13. Pimpinan dan rekan-rekan sejawat Penulis di KPPBC TMP Cikarang yang telah memberi arahan, semangat, dukungan serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis berharap koreksi dan masukan dari para pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan dikemudian hari. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Penulis,

Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Kerangka Teori	8
1.4.1 Teori Keadilan Hukum	9
1.4.2 Teori Kepastian Hukum.....	9
1.4.3 Teori Konstitusi Negara	11
1.4.4 Teori Integratif Hukum	12
1.5. Kerangka Konsep	14
1.6 Metode Penelitian	20
1.6.1 Bentuk penelitian	21
1.6.2 Tipologi Penelitian	22
1.6.3 Jenis Data	23
1.6.4 Jenis Bahan Hukum	24
1.6.5 Alat Pengumpul Data	25
1.6.6 Metode Analisis Data	25
1.6.7 Bentuk Hasil Penelitian	33
1.7 Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Keuangan Negara	29
2.1.1 Pengertian Keuangan Negara	29
2.1.2 Runag Lingkup Keuangan Negara	30
2.1.3 Asas-asas Baru dalam Pengelolaan Keuangan Negara	31
2.2 Kebijakan Fiskal	33
2.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal	36
2.2.2 Instrumen Kebijakan Fiskal	37
2.2.3 Tujuan Kebijakan Fiskal	38
2.2.4 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia	40

2.3	Kepabean.....	41
2.3.1	Pengertian, Tugas dan Fungsi Kepabeanan	41
2.3.2	Tanggung Jawab Bea Masuk	44
2.3.3	Kewajiban Kepabeanan	45
2.3.4	Fasilitas Fiskal di Bidang Kepabeanan	46
2.3.5	Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat	49

BAB III	HUBUNGAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU DALAM PENANGANAN HAK KEUANGAN NEGARA BERUPA BEA MASUK PADA PERUSAHAAN KAWASAN BERIKAT YANG DINYATAKAN PAILIT DAN CONTOH KASUS	58
----------------	---	-----------

3.1	Hubungan Hukum Administrasi Negara sebagai Hukum Publik dengan Hukum Perdata sebagai Hukum Privat	58
3.1.1	Undang-Undang Kepabeanan sebagai Hukum Administrasi Negara	75
3.1.2	Undang-Undang Kepailitan sebagai Hukum Privat (perdata)	60
3.1.3	Hubungan Undang-Undang Kepabeanan sebagai Hukum Administrasi dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai Hukum Privat Dalam Perkara Kepailitan	61
3.2	Kedudukan Negara sebagai Kreditur Preferen (Hak mendahului)\ atas perpajakan dalam kepailitan	64
3.3	Ketentuan Penanganan Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat yang Dinyatakan Pailit menurut Undang-Undang Kepabeanan	70
3.4	Penangan Kasus Perusahaan Tempat penimbunan Berikat (Kawasan Berikat) yang Dinyatakan Pailit	76
3.5	Mekanisme Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	78
3.6	Contoh kasus kepailitan Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat	84
3.6.1	Kasus Kepailitan PDKB PT Kepsonic Indonesia	84
3.6.2	Kasus Kepailitan PDKB PT Pandu Dewa Nata	88

BAB IV	PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH	91
---------------	---	-----------

4.1	Bagaimana Mekanisme Pemungutan Bea Masuk Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Penanggulangan Bea Masuk Yang Pailit Menurut Ketentuan Undang-Undang Kepabeanan	91
4.2	Bagaimana Akibat Hukum Dari Tidak Dapat Diterapkannya Ketentuan Pemungutan Bea Masuk Dalam Undang-Undang Kepabeanan Bagi Keuangan Negara pada Pengusaha TPB Yang dinyatakan Pailit	95
4.3	Bagaimana Mekanisme Ideal Pemungutan Bea Masuk Atas Perusahaan Kawasan Berikat Yang Pailit Yang Memenuhi Hak Keuangan Negara	98

4.3.1 Mekanisme Penetapan Pabean	98
4.3.2 Penerapan Diskresi	101
4.3.3 <i>Extra Effort</i> Upaya Penagihan Dengan Surat Paksa	133
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	xiv



DAFTAR TABEL

TABEL I.	Surat Penetapan Kepala KPPBC TMP A Bekasi No: S-17758/WBC.08/KPP.MP.01/2013 tanggal 19 Juni 2013	85
TABEL II.	Surat Penetapan Kepala KPPBC TMP A Bekasi No: S-22049/WBC.08/ KPP.MP.01 /2013 tanggal 30 Juli 2013	85



DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AUPB	:	Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik
BHP	:	Balai Harta Peninggalan
BM	:	Bea Masuk
BMN	:	Barang Milik Negara
BTD	:	Barang Tidak Dikuasai
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
HET	:	Harga Eceran Tertinggi
HPP	:	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
IKM	:	Industri Kecil Menengah
KB	:	Kawasan Berikat
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KITE	:	Kemudahan Ekspor Tujuan Impor
KPBPB	:	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KPPBC	:	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PDKB	:	Pengusaha Kawasan Berikat Merangkap Penyelenggara
PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
RI	:	Republik Indonesia
TMP	:	Tipe Madya Pabean
TPB	:	Tempat Penimbunan Berikat
TPP	:	Tempat Penimbunan Pabean
TPS	:	Tempat Penimbunan Sementara
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

Nama : Tumbur Abarham Jonathan Hutabarat
Nim : 2002190026
Judul : Pengamanan Hak Keuangan Negara Berupa Bea Masuk Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Yang Dinyatakan Pailit

Peran fasilitas fiskal dalam mendukung perekonomian negara sangat diperlukan. Kebijakan fasilitas fiskal dikelola oleh Kementerian Keuangan yang membawahi diantaranya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kedua direktorat jenderal ini berperan sebagai fiskus untuk memungut pajak untuk penerimaan negara serta melakukan upaya-upaya lain dalam mengamankan hak keuangan negara sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing direktorat jenderal termasuk mengelola kebijakan fiskal dengan instrument perpajakan. Dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul Inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian dalam bentuk karya tulis yang berjudul “PENGAMANAN HAK KEUANGAN NEGARA BERUPA BEA MASUK PADA PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK (KAWASAN BERIKAT) YANG DINYATAKAN PAILIT”. Penulis menggunakan metode penelitian menggunakan metode Penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa; 1) Undang-Undang Kepabeanaan merupakan hukum administrasi dalam kapasitas sebagai hukum publik sedangkan Undang-Undang Kepailitan merupakan hukum privat (perdata). 2) Diantara kepentingan kedua undang-undang tersebut, terdapat lembaga Hakim Pengawas yang mengawasi tugas dari kurator dalam mengurus dan memereskan harta boedel pailit. Bahwa keputusan hakim dianggap benar, dengan demikian keputusan hakim pengawas dalam rangka kepailitan menjadi sumber hukum yang patut dijalankan oleh para pihak dalam proses kepailitan khususnya TPB yang dinyatakan pailit. 3) Bahwa ketentuan administrasi Undang-Undang Kepabeanaan atas perusahaan TPB yang pailit kurang efektif atau berdaya guna dalam mengamankan hak-hak keuangan negara. 4) Dengan kepailitan perusahaan TPB maka status hukum perusahaan demi hukum dibawah sita umum, artinya pengurus kehilangan haknya mengurus asset perusahaan dan dialihkan kepada curator. Dengan demikian pengurus perusahaan TPB tidak cakap hukum. Oleh karena itu makai zin TPB harus dicabut dan status penangguhan bea masuk menjadi gugur sehingga menjadi terutang bea masuk. Dengan demikian muncul kewajiban perusahaan TPB dalam pailit untuk melunasi sendiri, namun sekiranya tidak bisa maka pejabat bea dan cukai secara jabatan (*exofficio*) dapat melakukan penetapan berdasarkan hasil audit. 5) Bahwa keengganan pejabat Bea dan cukai dalam mencabut izin fasilitas dan menetapkan surat penetapan pabean terhadap TPB yang dinyatakan pailit dan mengakibatkan tidak optimalnya pengamanan hak keuangan negara sehingga negara tidak menerima hak sebagaimana mestinya. Tindakan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak diperolehnya hak negara sepatutnya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Kepabeanaan, Kepailitan, Penagihan Pajak

Abstract

The role of fiscal facilities in supporting the country's economy is very necessary. The fiscal facility policy is managed by the Ministry of Finance, which oversees the Directorate General of Taxes (DGT) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). These two directorates generally act as tax authorities to collect taxes for state revenues and undertake other efforts to secure state financial rights in accordance with the main duties and functions of each directorate general, including managing fiscal policy with taxation instruments. From the above background, the author conducted a study with the title This is the reason for conducting research in the form of a paper entitled "SAFEGUARDING STATE FINANCIAL RIGHTS IN THE FORM OF IMPORT DUTY IN RECEIVING FACILITIES RECEIVING THE PAYMENT OF SUSPENSION OF IMPORT DUTIES (BONDED ZONES) DECLARED IN BANKRUPT". The author uses research methods using normative legal research methods (juridical normative), namely research that has an object of study about legal rules or regulations. From the results of the research conducted, it is concluded that; 1) The Customs Law is an administrative law in the capacity of a public law while the Bankruptcy Law is a private law (civil). 2) Between the interests of the two laws, there is an institution of Supervisory Judges that oversees the duties of the curator in managing and managing the assets of the bankrupt boedel. Whereas the judge's decision is considered correct, thus the decision of the supervisory judge in the context of bankruptcy becomes a source of law that should be carried out by the parties in the bankruptcy process, especially the TPB which is declared bankrupt. 3) Whereas the administrative provisions of the Customs Law on bankrupt TPB companies are less effective or efficient in securing state financial rights. 4) With the bankruptcy of the TPB company, the legal status of the company by law is under general confiscation, meaning that the management loses their right to manage company assets and is transferred to the curator. Thus the management of the TPB company is not legally competent. Therefore, the TPB permit must be revoked and the status of suspension of import duty becomes invalid so that it becomes payable import duty. Thus the obligation of the TPB company in bankruptcy to pay off itself, but if it is not possible then the exofficio customs and excise officer can make a determination based on the audit results. 5) The reluctance of Customs and excise officials in revoking facility permits and issuing customs determination letters against TPB declared bankruptcy and resulting in non-optimal security of state financial rights so that the state does not receive the right as it should. The actions of customs officials that result in the non-acquisition of state rights should be held accountable.

Keywords: *State Finance, Customs, Bankruptcy, Tax Collection*